

Politik Makna dalam Pemberitaan Sekolah Rakyat: Analisis Komunikasi Media *Online* Tribun-Timur.com

Kamsar¹, Abd Haris Zainuddin², Muh Nurqadri Jamal³

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

³ Universitas Almarisah Madani, Indonesia

Email : kamsar@unismuh.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis politik makna dalam pemberitaan Program Sekolah Rakyat pada media online Tribun-Timur.com dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini memadukan analisis framing model Entman dan analisis wacana kritis Fairclough untuk mengkaji bagaimana kebijakan pendidikan direpresentasikan, aktor negara ditampilkan, serta makna sosial tentang peran negara dalam pendidikan dibangun melalui teks media. Data penelitian berupa teks berita Tribun-Timur.com yang dipilih secara purposive, mencakup fase peluncuran program, tantangan implementasi, kritik publik, hingga narasi dampak kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberitaan Sekolah Rakyat merefleksikan praktik politik makna melalui konstruksi narasi dan framing kebijakan. Pada fase awal, Sekolah Rakyat cenderung ditingkatkan sebagai simbol kehadiran negara yang berpihak pada kelompok rentan, dengan pendidikan dimaknai sebagai instrumen keadilan sosial. Seiring waktu, muncul narasi tantangan dan kritik publik yang menghadirkan pengujian terhadap efektivitas dan keberlanjutan kebijakan. Di tengah dinamika tersebut, media juga menampilkan kembali narasi dampak dan testimoni aktor lokal sebagai bentuk penguatan legitimasi kebijakan. Penelitian ini menegaskan peran media online sebagai arena produksi dan negosiasi makna dalam diskursus kebijakan pendidikan.

Kata kunci: Politik Makna, Framing Media, Kebijakan Pendidikan, Sekolah Rakyat.

Politics of Meaning in the Reporting of "People's Schools": An Online Media Communication Analysis of Tribun-Timur.com

Abstract

This study aims to analyze the politics of meaning in the media coverage of the Sekolah Rakyat Program on the online news platform Tribun-Timur.com using a qualitative descriptive approach. The study integrates Entman's framing analysis and Fairclough's critical discourse analysis to examine how education policies are represented, how state actors are portrayed, and how social meanings regarding the role of the state in education are constructed through media texts. The research data consist of news articles published by Tribun-Timur.com, selected through purposive sampling and covering the phases of program launch, implementation challenges, public criticism, and policy impact narratives. The findings indicate that the coverage of Sekolah Rakyat reflects the politics of meaning through narrative construction and policy framing. In the initial phase, Sekolah Rakyat is predominantly framed as a symbol of state presence oriented toward vulnerable groups, with education understood as an instrument of social justice. Over time, narratives of challenges and public

criticism emerge, reflecting scrutiny of the policy's effectiveness and sustainability. Amid these dynamics, the media also reintroduces impact narratives and testimonials from local actors as a means of reinforcing policy legitimacy. This study underscores the role of online media as an arena for the production and negotiation of meaning within the discourse of education policy.

Keywords: *Politics of Meaning, Media Framing, Education Policy, Sekolah Rakyat Program*

PENDAHULUAN

Pendidikan sejak lama dipahami sebagai instrumen strategis negara dalam membangun kualitas sumber daya manusia sekaligus sebagai ruang sosial tempat nilai, kepentingan, dan orientasi kebijakan diproduksi serta dikomunikasikan kepada publik. Dalam konteks negara modern, kebijakan pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai upaya teknokratis untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah atau capaian akademik, tetapi juga sebagai medium simbolik yang merepresentasikan visi negara tentang keadilan sosial, kesejahteraan, dan masa depan bangsa. Coe dan Kuttner (2018) menegaskan bahwa kebijakan pendidikan kerap dikaitkan dengan upaya negara membangun legitimasi moral sebagai penjamin hak dasar warga, terutama ketika kebijakan tersebut dihubungkan dengan isu pemerataan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan senantiasa berada dalam ruang diskursif yang melibatkan dimensi politik, ekonomi, dan moral, serta tidak sepenuhnya terlepas dari dinamika kepentingan publik.

Dalam masyarakat demokratis yang ditandai oleh arus informasi yang cepat dan masif, media massa, khususnya media online, memegang peran penting dalam membentuk cara publik memahami kebijakan pendidikan. Media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga melakukan proses seleksi, penekanan, dan penafsiran realitas sosial melalui praktik framing. Entman (1993) menjelaskan bahwa framing bekerja dengan menonjolkan aspek tertentu dari realitas sosial untuk mempromosikan definisi masalah, evaluasi, serta rekomendasi penanganan. Melalui pilihan kata, struktur narasi, dan representasi aktor, media membangun makna tertentu tentang kebijakan publik, termasuk bagaimana peran negara dan kelompok sasaran kebijakan dipahami dalam ruang publik. Dalam konteks kebijakan pendidikan, praktik ini berkontribusi pada pembentukan opini publik dan penerimaan sosial terhadap kebijakan negara (Coe & Kuttner, 2018).

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa pemberitaan kebijakan pendidikan merefleksikan dinamika hubungan antara negara, media, dan masyarakat. McCombs dan Shaw (1972) melalui teori agenda-setting menegaskan bahwa media memiliki kemampuan untuk memengaruhi isu apa yang dianggap penting oleh publik. Lebih lanjut, McCombs (2004) menjelaskan bahwa agenda-setting tingkat kedua memungkinkan media membentuk atribut dan citra aktor kebijakan. Dalam praktiknya, sebagaimana ditunjukkan oleh Benford dan Snow (2000) serta Malin et al. (2019), media dapat menampilkan kebijakan pendidikan melalui bingkai afirmatif maupun kritis, yang secara simbolik memengaruhi cara kebijakan tersebut dipahami dan dinilai oleh masyarakat.

Dari perspektif analisis wacana kritis, Fairclough (1995; 2010) memandang wacana media sebagai praktik sosial yang terkait dengan struktur sosial dan konteks kekuasaan. Bahasa dalam teks media tidak bersifat netral, melainkan berfungsi membangun representasi tertentu tentang realitas sosial. Dalam konteks kebijakan pendidikan, cara

media merepresentasikan negara, kelompok sasaran kebijakan, dan isu ketimpangan mencerminkan dinamika relasi sosial yang dapat dianalisis secara kritis melalui teks pemberitaan. Oleh karena itu, analisis media menjadi penting untuk memahami bagaimana makna kebijakan dibentuk dan diperdebatkan dalam ruang publik.

Dalam beberapa tahun terakhir, wacana pemerataan pendidikan dan pengentasan kemiskinan kembali menguat seiring dengan munculnya berbagai program afirmatif negara. Salah satu kebijakan yang memperoleh perhatian media adalah Program Sekolah Rakyat, yang diposisikan sebagai upaya negara menghadirkan pendidikan gratis dan pembinaan karakter bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan. Dalam narasi kebijakan, Sekolah Rakyat dikemukakan sebagai instrumen untuk memperluas akses pendidikan dan memperkuat perlindungan sosial melalui jalur pendidikan. Namun, sebagaimana ditegaskan Fairclough (2010), kebijakan publik selalu diproduksi dan diperdebatkan dalam ruang diskursif yang melibatkan beragam perspektif dan kepentingan.

Pemberitaan media online menunjukkan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya dikonstruksikan sebagai program teknis pendidikan, tetapi juga sebagai kebijakan yang memiliki dimensi sosial dan moral. Pada fase awal peluncuran, teks pemberitaan cenderung menekankan aspek afirmatif kebijakan dengan menampilkan pemerintah sebagai aktor sentral dalam narasi pemerataan dan tanggung jawab negara di bidang pendidikan. Pola ini sejalan dengan temuan Howell et al. (2017) yang menyatakan bahwa pemberitaan kebijakan sosial pada tahap awal implementasi umumnya menonjolkan tujuan dan dampak positif yang diharapkan.

Seiring berjalannya waktu, pemberitaan tentang Sekolah Rakyat mulai menghadirkan narasi yang lebih reflektif dengan menyoroti tantangan implementasi dan keberlanjutan kebijakan. Lee dan Chan (2018) menyebut dinamika ini sebagai bentuk counter-framing, ketika wacana dominan mulai diperkaya oleh sudut pandang alternatif tanpa meniadakan keberadaan kebijakan itu sendiri. Dalam konteks kebijakan pendidikan, kritik semacam ini berfungsi sebagai mekanisme evaluasi publik terhadap tata kelola dan dampak jangka panjang kebijakan. Pemberitaan juga memperlihatkan keterkaitan isu Sekolah Rakyat dengan persoalan ketimpangan kelas, literasi digital, dan dinamika kelas menengah (Lukacovic, 2020). Di tengah dinamika tersebut, media juga menghadirkan narasi dampak dan testimoni aktor lokal yang menegaskan capaian kebijakan di tingkat daerah. Praktik ini dapat dipahami sebagai bagian dari proses penguatan legitimasi kebijakan melalui pengalaman empiris dan representasi lokal, sebagaimana dibahas Fairclough (2010) dalam analisis wacana kebijakan. Pola ini menunjukkan bahwa media berperan dalam menampilkan beragam perspektif, baik afirmatif maupun kritis, dalam pemberitaan kebijakan pendidikan.

Meskipun kajian tentang kebijakan pendidikan dan media telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian masih menempatkan media sebagai saluran informasi semata. Padahal, sebagaimana ditegaskan Fairclough (2010), makna kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh teks kebijakan, tetapi juga oleh cara kebijakan tersebut direpresentasikan dan diperdebatkan dalam ruang media. Selain itu, penelitian framing kebijakan pendidikan di Indonesia masih relatif terbatas dalam mengintegrasikan analisis framing dan analisis wacana kritis secara simultan, khususnya pada konteks media online daerah seperti Tribun-Timur.com yang memiliki posisi strategis dalam menjembatani wacana nasional dan realitas lokal (Howell et al., 2017).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis politik makna dalam pemberitaan Program Sekolah Rakyat di media online Tribun-Timur.com. Penelitian ini berfokus pada bagaimana Sekolah Rakyat dibingkai, bagaimana aktor kebijakan direpresentasikan, serta bagaimana dinamika kritik dan legitimasi kebijakan dikonstruksikan melalui bahasa media. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi kajian komunikasi politik dan wacana media, sekaligus kontribusi empiris dalam memahami peran media online dalam diskursus kebijakan pendidikan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain analisis framing dan analisis wacana kritis untuk mengkaji politik makna dalam pemberitaan Sekolah Rakyat pada media online Tribun-Timur.com. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam proses konstruksi makna, ideologi, dan relasi kuasa yang bekerja di balik teks media (Creswell, 2014). Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana media membingkai kebijakan pendidikan, merepresentasikan aktor negara, serta membentuk makna sosial terkait peran negara dalam pendidikan.

Data penelitian bersumber dari teks berita Tribun-Timur.com yang memuat pemberitaan tentang Sekolah Rakyat dalam periode awal peluncuran hingga narasi evaluasi dan dampak kebijakan. Pemilihan data dilakukan secara *purposive sampling* (Assingikily, 2021), dengan kriteria berita yang secara eksplisit membahas kebijakan Sekolah Rakyat, aktor pemerintah, respons publik, serta implikasi sosial kebijakan tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran arsip berita media online.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, peneliti mengidentifikasi tema-tema utama dalam pemberitaan untuk memetakan narasi dominan. Kedua, dilakukan analisis framing dengan merujuk pada model Entman (1993), yang mencakup pendefinisian masalah, penilaian penyebab, evaluasi moral, dan rekomendasi solusi. Ketiga, analisis diperdalam menggunakan pendekatan Critical Discourse Analysis (CDA) Fairclough (1995) untuk mengungkap relasi kuasa, ideologi, serta praktik legitimasi dan delegitimasi yang dibangun melalui bahasa media. Validitas data dijaga melalui ketekunan pengamatan, konsistensi kategorisasi, dan keterkaitan antara data, teori, serta konteks sosial yang dianalisis (Miles, Huberman, & Saldana, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat empat narasi besar yang merepresentasikan politik makna dalam pemberitaan Sekolah Rakyat. Pertama, narasi peluncuran program yang memosisikan Sekolah Rakyat sebagai terobosan strategis negara dalam mewujudkan pemerataan pendidikan dan pemutusan rantai kemiskinan. Kedua, narasi tantangan Sekolah Rakyat yang menghadirkan sudut pandang lebih reflektif dan kritis terhadap implementasi kebijakan. Ketiga, narasi kritik publik yang menempatkan Sekolah Rakyat dalam pusaran ketimpangan sosial, literasi digital, dan kekecewaan kelas menengah. Terakhir, narasi dampak Sekolah Rakyat yang berfungsi sebagai bentuk re-legitimasi kebijakan melalui testimoni pemerintah daerah. Untuk lebih jelasnya, pemetaan keempat narasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Politik Makna dalam Pemberitaan Sekolah Rakyat di Tribun-Timur.com

No	Tema	Sumber Berita Tribun Timur	Framing Utama	Representasi Aktor	Implikasi Makna	Kategori Politik Makna	Narasi Politik Makna
1	Peluncuran Program Sekolah Rakyat	<i>Sekolah Rakyat Launching 14 Juli, Pemerintah Hadirkan Pendidikan Gratis dan Pembinaan Karakter</i> (https://makassar.tribunnews.com/2025/07/11/sekolah-rakyat-launching-14-juli-pemerintah-hadirkan-pendidikan-gratis-dan-pembinaan-karakter)	Program Sekolah Rakyat dibingkai sebagai terobosan strategis negara dalam pemerataan pendidikan dan pemutusan rantai kemiskinan	Presiden Prabowo direpresentasikan sebagai penggagas utama kebijakan, pemerintah sebagai penanggung jawab program, dan siswa dari keluarga kurang mampu sebagai kelompok sasaran prioritas kebijakan.	Pendidikan dimaknai sebagai instrumen keadilan sosial dan wujud komitmen negara dalam memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan.	Legitimasi Kekuasaan dan Welfare State	Negara diposisikan sebagai aktor utama yang hadir secara penuh melalui pendidikan gratis dan pembinaan karakter sebagai investasi masa depan bangsa
2	Tantangan Sekolah Rakyat	<i>Sekolah Rakyat: Harapan Akar Rumput</i> (https://makassar.tribunnews.com/2025/05/13/sekolah-rakyat-harapan-akar-rumput)	Sekolah Rakyat dibingkai sebagai harapan sosial yang masih rapuh dan menghadapi tantangan struktural dalam implementasi	Negara direpresentasikan sebagai aktor yang beritikad baik namun diuji konsistensi, anak miskin sebagai subjek rentan, dan birokrasi sebagai potensi penghambat	Pendidikan dimaknai bukan sekadar akses, tetapi sebagai proses berkelanjutan yang menuntut kualitas, kesinambungan, dan koordinasi lintas sektor	Kritik Konstruktif terhadap Negara dan Tata Kelola Kebijakan	Negara dituntut tidak hanya hadir secara simbolik, tetapi menjamin mutu, keberlanjutan, dan jalur masa depan bagi anak-anak Sekolah Rakyat

							agar tidak terjebak dalam kebijakan transisional
3	Kritik Publik tentang Sekolah Rakyat	<i>Prof Hamid Paddu: Ketimpangan Kian Terasa, Masyarakat Kelas Menengah Ditinggal Pemerintah</i> (https://makassar.tribunnews.com/makassar/1811763/prof-hamid-paddu-ketimpangan-kian-terasa-masyarakat-kelas-menengah-ditinggal-pemerintah)	Sekolah Rakyat dibingkai sebagai respons normatif terhadap krisis ketimpangan sosial, namun dinilai belum menyentuh akar persoalan struktural kelas menengah dan problem literasi digital	Prof. Hamid Paddu direpresentasikan sebagai intelektual kritis, kelas menengah sebagai kelompok yang merasa kurang terakomodasi dalam kebijakan, pemerintah sebagai aktor yang dipersepsikan belum menjangkau seluruh lapisan sosial secara seimbang, serta media digital sebagai ruang artikulasi kritik publik.	Pendidikan dimaknai sebagai proses pencerahan sosial dan literasi kritis, bukan sekadar bantuan fisik, untuk meredam kemarahan, hoaks, dan ketimpangan yang diproduksi oleh sistem digital dan ekonomi	Problematisasi Kebijakan dan Kritik Struktural terhadap Negara	Sekolah Rakyat diposisikan sebagai kebijakan yang perlu dievaluasi dan diredefinisi agar lebih inklusif, dialogis, serta adaptif terhadap kompleksitas ketimpangan sosial dan tantangan literasi digital.
4	Dampak Sekolah Rakyat	<i>Setahun Pemerintahan Prabowo, Bupati Barru Andi Ina Kartika Apresiasi Program Sekolah Rakyat</i> (https://makassar.tribunnews.com)	Sekolah Rakyat dibingkai sebagai kebijakan yang telah memberikan dampak nyata dan terukur bagi peningkatan pendidikan	Presiden Prabowo direpresentasikan sebagai pemimpin efektif, Bupati Barru sebagai representasi pemerintah daerah yang loyal dan optimistis, masyarakat	Pendidikan dimaknai sebagai investasi sosial jangka panjang yang berdampak ganda, yakni peningkatan kualitas SDM anak dan	Penguatan Legitimasi Kebijakan dan Politik Pembangunan Inklusif	Negara diposisikan berhasil menghadirkan kebijakan yang tidak hanya simbolik, tetapi berdampak langsung, terintegrasi

		m/news/1816265/setahun-pemerintahan-prabowo-bupati-baru-andi-inakartika-apresiasi-program-sekolah-rakyat	, kesejahteraan, dan pengentasan kemiskinan di daerah	miskin sebagai penerima manfaat, dan negara sebagai penggerak pembangunan sosial	penguatan ekonomi keluarga melalui pemberdayaan orang tua	i dengan program ekonomi, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap arah pembangunan nasional
--	--	---	---	--	---	--

Berdasarkan pemetaan data pada tabel di atas, pemberitaan Tribun Timur mengenai Sekolah Rakyat menunjukkan bagaimana praktik framing dan representasi kebijakan dalam teks media berkontribusi pada pembentukan politik makna. Media online berfungsi sebagai arena produksi dan negosiasi makna yang memengaruhi cara publik memahami kebijakan pendidikan serta peran negara di dalamnya. Temuan ini sejalan dengan pandangan Entman (1993) yang menegaskan bahwa framing bekerja melalui proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari realitas sosial, sehingga membentuk cara khalayak mendefinisikan masalah, menilai aktor, dan memaknai solusi kebijakan. Dalam konteks ini, Sekolah Rakyat tidak tampil sebagai kebijakan yang tunggal dan netral, melainkan sebagai arena tafsir diskursif yang merepresentasikan visi negara tentang keadilan sosial dalam pendidikan.

Pada fase awal pemberitaan, Sekolah Rakyat direpresentasikan sebagai simbol kehadiran negara yang menekankan tanggung jawab sosial dan pemerataan akses pendidikan bagi kelompok rentan. Kebijakan ini diproyeksikan sebagai upaya strategis untuk mengatasi ketimpangan pendidikan dan kemiskinan struktural. Representasi pemerintah pusat sebagai aktor utama dalam perumusan kebijakan, serta siswa dari keluarga miskin sebagai kelompok sasaran utama, menunjukkan bagaimana narasi kebijakan dalam pemberitaan berkontribusi pada proses legitimasi kebijakan melalui kerangka welfare state. Pola ini selaras dengan teori agenda-setting tingkat kedua (McCombs, 2004), di mana media membentuk atribut, penilaian moral, dan tanggung jawab aktor kebijakan dalam ruang publik. Penekanan pada keberhasilan awal dan dampak positif kebijakan, sebagaimana dikemukakan Quiring dan Weber (2012), berperan signifikan dalam membangun legitimasi sosial pemerintah dan membentuk citra negara sebagai aktor yang responsif terhadap ketimpangan pendidikan.

Seiring berjalannya waktu, narasi afirmatif tersebut mengalami pengujian melalui munculnya pemberitaan yang menyoroti tantangan implementasi kebijakan. Sekolah Rakyat diposisikan sebagai harapan sosial yang menghadapi berbagai persoalan struktural, mulai dari konsistensi negara, kapasitas birokrasi, hingga koordinasi lintas sektor. Dalam bingkai ini, pendidikan tidak lagi dimaknai semata sebagai akses, melainkan sebagai proses jangka panjang yang menuntut kualitas, kesinambungan, dan tanggung jawab institusional. Pergeseran ini mencerminkan praktik counter-framing, di mana media membuka ruang kritik konstruktif tanpa menafikan keberadaan dan tujuan kebijakan (Gamson & Modigliani,

1989). Kritik yang muncul bersifat konstruktif dan berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang mendorong negara untuk melampaui simbol kebijakan dan memastikan keberlanjutan masa depan peserta didik Sekolah Rakyat.

Ketegangan wacana semakin menguat ketika kritik publik dan pandangan intelektual kritis masuk ke dalam ruang pemberitaan. Sekolah Rakyat dibingkai sebagai respons normatif terhadap ketimpangan sosial, namun sekaligus dipersoalkan karena dinilai belum sepenuhnya menyentuh persoalan struktural yang lebih luas, termasuk yang dialami kelas menengah dan tantangan literasi digital. Dalam konteks ini, media online berperan sebagai ruang artikulasi beragam pandangan publik mengenai kebijakan pendidikan. Pendidikan dimaknai tidak hanya sebagai bantuan material, tetapi juga sebagai proses pencerahan sosial dan penguatan literasi kritis (Intan et al., 2021; Setiadi, 2024). Pola ini sejalan dengan pendekatan critical discourse analysis (Fairclough, 1995) yang memandang media sebagai arena pertarungan wacana, di mana bahasa digunakan untuk mengungkap relasi kuasa, eksklusi sosial, dan ketimpangan struktural. Pendidikan dalam narasi ini tidak lagi dimaknai sebagai bantuan material semata, melainkan sebagai proses pencerahan dan literasi kritis yang menuntut transformasi struktural.

Menariknya, di tengah dinamika kritik tersebut, pemberitaan Tribun Timur juga menampilkan narasi dampak dan testimoni aktor lokal yang menegaskan capaian kebijakan di tingkat daerah. Sekolah Rakyat direpresentasikan sebagai kebijakan yang memberikan perubahan nyata dalam peningkatan akses pendidikan dan kesejahteraan keluarga rentan. Narasi ini berfungsi sebagai bentuk penguatan legitimasi kebijakan melalui pengalaman empiris dan representasi lokal, yang dalam kerangka komunikasi politik dapat dipahami sebagai praktik re-legitimization discourse (Van Leeuwen, 2007). Penelitian Abror et al. (2025) menunjukkan bahwa narasi dampak yang berakar pada pengalaman nyata mampu membangun ikatan emosional dengan audiens dan memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, meskipun kritik terus hadir, media tetap memainkan peran sentral dalam menjaga keseimbangan antara kontrol sosial dan legitimasi negara dalam wacana kebijakan pendidikan.

SIMPULAN

Pemberitaan Sekolah Rakyat di media online Tribun-Timur.com merepresentasikan praktik politik makna yang bekerja melalui konstruksi narasi, framing isu, dan representasi aktor kebijakan. Media tidak hanya berfungsi sebagai saluran penyampaian informasi, tetapi juga sebagai ruang diskursif yang berkontribusi dalam membentuk pemahaman publik mengenai peran negara dalam bidang pendidikan. Empat narasi utama, yaitu peluncuran program, tantangan implementasi, kritik publik, dan narasi dampak menunjukkan bahwa Sekolah Rakyat dikonstruksikan secara dinamis sebagai arena tafsir yang merefleksikan relasi antara kebijakan sosial, kekuasaan, dan ekspektasi masyarakat. Pada fase awal pemberitaan, Sekolah Rakyat direpresentasikan sebagai simbol kehadiran negara yang menekankan tanggung jawab sosial dan pemerataan akses pendidikan. Pendidikan dimaknai sebagai instrumen keadilan sosial dan upaya memutus rantai kemiskinan, dengan penekanan pada peran negara sebagai aktor utama kebijakan. Pola representasi ini berkontribusi pada pembentukan pemaknaan kebijakan dalam kerangka welfare state dan penguatan atribut positif terhadap kebijakan pendidikan. Seiring berkembangnya pemberitaan, media juga menghadirkan narasi mengenai tantangan implementasi dan kritik

publik yang membuka ruang counter-framing. Dalam konteks ini, kebijakan Sekolah Rakyat dipersoalkan dari aspek pelaksanaan, ketimpangan struktural, serta tantangan literasi digital, termasuk yang dialami kelompok kelas menengah. Kritik yang muncul tidak sepenuhnya meniadakan legitimasi kebijakan, melainkan berfungsi sebagai bentuk refleksi publik dan kontrol sosial terhadap kualitas serta keberlanjutan program pendidikan. Di tengah dinamika tersebut, pemberitaan Tribun Timur turut menampilkan narasi dampak dan testimoni aktor lokal yang menggambarkan capaian kebijakan di tingkat daerah. Narasi ini memperlihatkan bagaimana pengalaman empiris dan konteks lokal berkontribusi dalam memperkuat pemaknaan kebijakan sebagai upaya pembangunan pendidikan yang inklusif dan berorientasi jangka panjang. Penelitian ini menegaskan bahwa pemberitaan Sekolah Rakyat merefleksikan peran media online sebagai arena pertarungan makna yang memediasi antara legitimasi kebijakan dan artikulasi kritik publik, serta membentuk diskursus pendidikan sebagai isu yang memiliki dimensi politik, moral, dan sosial dalam konteks kebijakan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Benford, R. D., & Snow, D. A. (2000). Framing processes and social movements: An overview and assessment. *Annual Review of Sociology*, 26, 611–639. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.26.1.611>
- Coe, K., & Kuttner, P. J. (2018). Education reform and the media: Framing, politics, and public discourse. *Educational Policy*, 32(1), 58–85. <https://doi.org/10.1177/0895904816681529>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58.
- Fairclough, N. (1995). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. London: Longman.
- Gamson, W. A., & Modigliani, A. (1989). Media discourse and public opinion on nuclear power. *American Journal of Sociology*, 95(1), 1–37.
- Howell, S., Doan, M., & Harbin, A. (2017). Detroit to Flint and Back Again: Solidarity Forever. *Critical Sociology*, 45(1), 63–83. <https://doi.org/10.1177/0896920517705438>
- Intan, T., Handayani, V., & Saefullah, N. (2021). Membangun Generasi Kritis Melalui Keterampilan Literasi Digital. *Selaparang Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 5(1), 89. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v5i1.6404>
- Lee, F. L. F., & Chan, J. M. (2018). Counter-framing and critical journalism in policy debates. *Journalism Studies*, 19(13), 1905–1923. <https://doi.org/10.1080/1461670X.2017.1325729>
- Lukacovic, M. (2020). Digital literacy, inequality, and media discourse in education policy. *Communication, Culture & Critique*, 13(3), 384–401. <https://doi.org/10.1093/ccc/tcaa020>
- Malin, J. R., Ball, S. J., & Santori, D. (2019). Policy actors and agenda-setting in education reform. *Educational Policy*, 33(6), 843–865. <https://doi.org/10.1177/0895904817723733>
- McCombs, M. (2004). *Setting the agenda: The mass media and public opinion*. Cambridge: Polity Press.

- McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The agenda-setting function of mass media. *Public Opinion Quarterly*, 36(2), 176–187. <https://doi.org/10.1086/267990>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Quiring, O., & Weber, M. (2012). Between utility and legitimacy: Media coverage of government policies. *Journal of Public Affairs*, 12(3), 215–226.
- Setiadi, F. (2024). Bias Gender dalam Narasi Media Online tentang Kekerasan Seksual di Mandailing Natal: Analisis Wacana Kritis Sara Mills. *Saree Research in Gender Studies*, 6(2). <https://doi.org/10.47766/saree.v6i2.4895>
- Van Leeuwen, T. (2007). Legitimation in discourse and communication.